

PERAN BAWASLU DALAM MENINGKATKAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF PILKADA 2024 DI JAWA BARAT MELALUI FORUM WARGA

Gerald Arung Pagiling

Government Studies, Faculty of Social and Politics, Brawijaya University

geraldarung430@gmail.com

Abstract

The 2024 Regional Head Election (Pilkada) is the first to be held simultaneously in Indonesia. This Pilkada is an important moment in democracy that requires active participation from all elements of society. The role of the Election Supervisory Body (Bawaslu) is very important in ensuring that this Pilkada can run honestly, fairly, and transparently. This article aims to analyze the role of Bawaslu in improving participatory supervision in the 2024 Pilkada in West Java through the Citizens' Forum. This Citizens' Forum is a forum for community discussion and coordination which is considered an effective means to strengthen participatory supervision. The research method used is a literature study. The results of this study indicate that Bawaslu seeks to facilitate the community in actively participating through voter education, supervision training, and the formation of a citizen forum network. This study concludes that participatory supervision through the Citizens' Forum will make a significant contribution to ensuring a more transparent and accountable Pilkada in West Java.

Keywords: *Bawaslu; Participatory Supervision; Citizens Forum; 2024 Regional Elections.*

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 adalah yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia secara serentak. Pilkada ini menjadi momen penting dalam demokrasi yang membutuhkan partisipasi yang aktif dari semua elemen Masyarakat. Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat penting dalam memastikan Pilkada ini dapat berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif di Pilkada 2024 di Jawa Barat Melalui Forum Warga. Forum Warga ini adalah wadah diskusi dan koordinasi Masyarakat yang dianggap menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat pengawasan secara partisipatif. Metode Penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu berupaya memfasilitasi Masyarakat dalam berpartisipasi aktif melalui Pendidikan pemilih, pelatihan pengawasan, dan pembentukan Jaringan forum warga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan partisipatif melalui Forum Warga akan memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan Pilkada yang lebih transparan dan akuntabel di Jawa Barat.

Kata Kunci: *Bawaslu; Pengawasan Partisipatif; Forum Warga; Pilkada 2024.*

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah manifestasi dari demokrasi yang diadakan secara langsung dan terbuka di Indonesia yang menuntut penyelenggaraan yang demokratis, jujur, adil, dan transparan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Peran

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai Lembaga independent yang mempunyai tugas utama dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, termasuk Pilkada, sangatlah penting. Dalam prakteknya, Pilkada sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti potensi pelanggaran pemilu, manipulasi

suara, hingga rendahnya partisipasi Masyarakat dalam pengawasan proses demokrasi tersebut. Bawaslu, sebagai Lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu maupun Pilkada, memiliki mandat tidak hanya untuk menindak pelanggaran tetapi juga berperan untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif Masyarakat dalam mengawal demokrasi.

Integritas Bawaslu akan diuji eksistensi strategisnya mengawal Pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan Pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan Pemilu yang tidak sesuai aturan.¹ Dalam konteks Pilkada 2024 di Jawa Barat, Bawaslu menghadapi tantangan besar, mengingat Provinsi Jawa Barat ini memiliki jumlah penduduk yang besar, keragaman budaya, dan dinamika politik yang kompleks. Untuk itu, pendekatan yang inovatif diperlukan guna memastikan bahwa Masyarakat terlibat secara aktif dalam pengawasan partisipatif. Salah satu pendekatan tersebut adalah melalui forum warga yang menjadi wadah yang memungkinkan Masyarakat untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan melaporkan potensi pelanggaran selama proses Pilkada berlangsung.

Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan

demokrasi yang berkualitas. Namun, masih banyak Masyarakat yang belum memahami bahwa peran mereka penting dalam proses pengawasan. Selain itu, minimnya literasi politik dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu seringkali menjadi kendala dalam meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan pemilu. Pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat merupakan langkah penting untuk mewujudkan asas luber jurdil dan berintegritas dalam proses demokrasi.² Forum warga ini memiliki potensi besar dalam mendukung pengawasan partisipatif karena berbasis pada kegiatan langsung Masyarakat di Tingkat paling bawah. Melalui forum ini, Bawaslu dapat memberikan edukasi tentang pentingnya pengawasan Pilkada, cara pelaporan pelanggaran, dan mendorong Masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga integritas pemilu. Model pelibatan masyarakat dalam pengawasan tahapan pemilu merupakan salah satu strategi dalam rangka mencegah terjadinya praktek politik uang.³ Selain itu, forum warga dapat berfungsi sebagai ruang untuk membangun kepercayaan antara Masyarakat dan penyelenggara pemilu, sehingga meningkatkan kualitas demokrasi di Tingkat lokal.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif Masyarakat melalui forum warga di Pilkada 2024 di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi forum warga

¹ Suwari Akhmaddhian, Erga Yuhandra, Yani Andriyani. 2020. "Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas". Conference On Law And Social Studies

² Gokma Toni Parlindungan S, Michael Manarov Gultom. 2023. "Pendidikan Pengawasan Pemilu Bagi Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas".

Ensiklopedia Education Review 5(1):6-12. <https://doi.org/10.33559/eer.v5i1.1727>

³ Hendra Surya, Irwandi Irwandi. 2023. "Peran Masyarakat dalam Meminimalisir Terjadinya Pelanggaran Pemilu". Al Ukhwah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 2(2):144-151

sebagai strategi Pengawasan Partisipatif. Dengan memahami berbagai dinamika dan dampak dari penyelenggaraan forum warga, diharapkan nantinya dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi Bawaslu dalam meningkatkan perannya sebagai pengawas demokrasi yang inklusif dan responsive terhadap kebutuhan daripada Masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya ingin memperkaya literatur tentang pengawasan partisipatif tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam Upaya meningkatkan kualitas Pilkada di Indonesia, secara khusus di Jawa Barat. Dengan demikian, Pelaksanaan Pilkada 2024 dapat menjadi momentum yang penting dan menunjukkan bahwa partisipasi Masyarakat dalam pengawasan bukan hanya sebatas kewajiban saja, tetapi juga hak demokratis yang harus dijamin dan difasilitasi oleh negara.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yakni merupakan metode yang bertujuan untuk menyelidiki objek, keadaan, pandangan atau pemikiran, fenomena atau peristiwa, serta status kelompok manusia (Nazir, 2003: 54). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu mengungkapkan fenomena yang diteliti secara sistematis yang tujuannya untuk mendapatkan kebenaran dari permasalahan yang dikaji, sehingga hasilnya dapat digunakan sekaligus dipertanggungjawabkan baik secara praktis maupun secara keilmuan (Sugiyono, 2013:29). Fokus penelitian ini terletak pada komitmen Bawaslu dalam kegiatan pengawasan, khususnya

dalam pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil dari semua kalangan untuk ikut serta dalam proses pengawasan tahapan Pilkada. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengamati bagaimana peran Bawaslu yang melibatkan Masyarakat sipil dalam pengawasan partisipatif melalui salah satu program Bawaslu, yaitu Forum Warga.

Teknik pengumpulan data pada artikel ini melalui wawancara dan kajian Pustaka. Teknik wawancara yang merupakan pengumpulan data melalui wawancara dengan partisipan untuk mengetahui lebih lanjut tentang fenomena yang diamati, hal ini didapatkan melalui observasi langsung ke lapangan. Wawancara dilaksanakan dengan warga yang mengikuti kegiatan forum warga yang bertempat di Kabupaten Bandung. Kajian Pustaka juga digunakan sebagai Teknik pengumpulan data di artikel ini dengan mengacu pada literatur dari peneliti-peneliti sebelumnya yang telah lebih dahulu meneliti fenomena serupa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif adalah proses pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam memantau, menganalisis, serta melaporkan pelaksanaan kebijakan, program, ataupun aktivitas tertentu untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas. Pengawasan partisipatif mengacu pada pemahaman tentang partisipasi politik. Partisipasi politik itu sendiri adalah bagaimana keterlibatan masyarakat atau rakyat banyak dalam kegiatankegiatan politik.⁴ Dalam konteks Pilkada 2024, pengawasan

⁴ Isnanto Bidja. 2022. "Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis". Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 6(1):2034-

2041. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2740>

partisipatif merujuk pada Upaya Masyarakat untuk turut serta mengambil bagian dalam proses pengawasan tahapan pilkada 2024. Masyarakat dituntut untuk ikut Serta mengawasi seluruh tahapan Pilkada guna mencegah pelanggaran, memastikan proses berlangsung secara jujur, adil, dan transparan serta meningkatkan kepercayaan terhadap hasil pemilu. Ciri-ciri Pengawasan Partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Keterlibatan langsung Masyarakat, Masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga sebagai subjek yang turut ambil bagian dalam Pilkada 2024
2. Bersifat sukarela, partisipasi dilakukan atas kesadaran dari Masyarakat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
3. Berbasis Komunitas, dengan melibatkan kelompok kelompok Masyarakat lokal, seperti LSM dan organisasi Masyarakat.
4. Berorientasi pada kepentingan public, bertujuan untuk menciptakan proses yang transparan dan bertanggung jawab.

Disamping ciri ciri tersebut, terdapat juga tujuan dari pelaksanaan pengawasan partisipatif, antara lain:

1. Mencegah Pelanggaran, Masyarakat dapat bertindak sebagai “mata dan telinga” untuk mendeteksi indikasi indikasi kecurangan, politik uang, ataupun

penyalahgunaan wewenang.

2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, pengawasan yang dijalankan oleh Masyarakat membantu penyelenggara pemilu dalam memastikan penyelenggaraan pemilu yang adil, jujur, transparan, dan akuntabel.
3. Memberdayakan Masyarakat, memberikan edukasi dan kesadaran kepada Masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka di dalam proses demokrasi
4. Meningkatkan Kepercayaan, pengawasan aktif dari Masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan public terhadap hasil dari Pilkada.

Simbol Pengawasan Partisipatif

Salah satu simbol dari pengawasan Partisipatif adalah keterlibatan warga yang dapat dilakukan melalui forum warga. Partisipasi warga sebagai salah satu subjek utama dalam Pilkada memiliki peran penting untuk ikut serta memastikan kualitas penyelenggaraan Pilkada. Seluruh warga dari berbagai kalangan dapat berpartisipasi dengan mencegah pelanggaran serta secara aktif turut mengawasi dan memantau seluruh proses tahapan Pilkada. Rakyat berperan penting dalam demokrasi dimana pemerintah dalam negara demokrasi memerlukan persetujuan rakyat sehingga keterlibatan masyarakat merupakan unsur dasar dalam demokrasi yang salah satunya yaitu sebagai pengawas partisipatif.⁵

⁵ Putri Amelia Nugraha, Muhammad Hendri Nuryadi, Erna Yuliandri. 2023. “Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam

Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Di Kabupaten Boyolali. Jurnal Pemikiran dan

Misalnya dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih, mengetahui di suatu daerah tidak terdapat petugas pemutakhiran daftar pemilih yang melaksanakan tugas maupun saat mengetahui terdapat nama yang tidak berhak dalam daftar pemilih makadapat menyampaikannya ke pengawas pemilu. Demikian pula, Ketika mengetahui adanya praktik pembagian uang atau money politik dan sembako jelang pemungutan suara. Cara keempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan Pilkada adalah dengan melaporkan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Pengawasan tersebut tidak mungkin dapat tersampaikan dengan baik tanpa adanya forum warga yang merupakan salah satu simbol dari pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Karena metode pengawasan partisipatif juga belum tentu diketahui oleh warga, sehingga dengan adanya forum warga dapat menyampaikan pengetahuan yang baik mengenai pengawasan partisipatif kepada seluruh warga. Sebagai salah satu simbol pengawasan partisipatif, forum warga juga menjadi salah satu implementasi mendasar bagi terlaksannya pengawasan yang melibatkan seluruh elemen yang ada. Dimana warga dapat menjadi pemilih, dipilih, penyelenggara dan kini warga turut serta dalam pengawasan. Sehingga hal ini yang menjadikan dasar dan modal yang kuat bagi pengawasan partisipatif dalam Pilkada 2024.

Tujuan Dan Manfaat Forum Warga

Forum warga memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Sebagai Media Sosialisasi pengawasan Pemilu kepada Kelompok Masyarakat.

2. Media komunikasi antara pengawas pemilu dan kelompok Masyarakat.
3. Menciptakan atmosfir pengawasan pemilu di Tengah-tengah Masyarakat.

Manfaat dari kegiatan Forum Warga yang diadakan oleh Bawaslu antara lain:

1. Pengawasan Pemilu memiliki legitimasi yang kuat karena adanya dukungan dari Masyarakat sipil.
2. Terjaminnya suara Masyarakat yang telah disalurkan lewat Pemilu yang merupakan hak konstitusionalnya.
3. Partisipasi Masyarakat semakin meningkat tidak hanya dalam pemberian suara atau sebagai objek pemilu, tetapi juga untuk memastikan bahwa suara yang telah diberikan dalam pemilu tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Masyarakat mendapat kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas.
5. Terciptanya pemilu yang berkualitas sehingga dapat melahirkan pemimpin bangsa yang berintegritas dan mendapat legitimasi yang kuat dari Masyarakat.
6. Menambah wawasan dan pengetahuan Masyarakat terkait pengawasan pada

khususnya dan kepemiluan pada umumnya.

7. Mengakomodir segala perbedaan pendapat yang muncul di Masyarakat terkait pengawasan pemilu.

Metode Forum Warga Pengawasan Pemilu

Terdapat dua metode yang digunakan dalam Forum Warga yaitu Dialogis dan Partisipatoris yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, dialogis menurut KBBI, dialogis berarti berarti bersifat terbuka dan komunikatif. Pendekatan dialogis merupakan proses pendekatan antara dua paham atau lebih dengan cara komunikasi secara terbuka. Proses pendekatan melalui komunikasi atau interaksi antarpersonal yang memiliki timbal balik antar sesamanya. Dialogis dapat juga dikatakan sebagai suatu proses penyampaian pesan antarpersonal yang menunjukkan adanya interaksi. Pentingnya metode dialogis ini karena setiap orang memiliki prinsip kebenaran merka masing masing sehingga melalui dialogis ini dapat mengetahui sejauh mana pandangan seseorang akan kebenaran dan bagaimana mengkomunikasikan kebenaran yang sesungguhnya dinilai dari prinsip kebenaran orang lain. Hal ini dimaksudkan agar segala pengetahuan terkait pengawasan pemilu dapat tersampaikan dengan baik.

Kedua, partisipatoris ini terdiri dari dua yaitu partisipatoris vertikal dan horizontal. Partisipatoris vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam Masyarakat yang terlibat di dalamnya atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain. Sedangkan Partisipatoris Horizontal adalah Dimana masyarakatnya tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara

satu dengan yang lain, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Cara pendekatan melalui metode dialogis dan partisipatoris dapat dilakukan dengan pendekatan online maupun offline.

Materi Forum Warga Pengawasan Pemilu

Materi yang akan disampaikan pada kegiatan forum warga, pada dasarnya adalah materi pengawasan partisipatif Pemilu yang terdiri dari:

- 1) Materi dasar pentingnya pengawasan pemilu sebagai ruang partisipasi masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan pemilu Materi ini disampaikan di dalam kegiatan forum warga sebagai dasar awal bagi forum warga untuk memahami apa itu pengawasan pemilu. Tanpa adanya materi ini, forum warga akan kesulitan dalam menentukan tema-tema yang efektif untuk menjadi bahan diskusi bersama maupun bahan pengetahuan dalam melakukan pengawasan partisipatif. Materi ini juga bertujuan mengajak warga untuk memahami bahwa dengan adanya pengawasan menjadikan warga memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam mengawal penyelenggaraan proses pemilu. Sehingga dengan adanya pemilu, warga tidak lagi hanya sekedar memilih, namun dapat memastikan keberlangsungan pemilu

berjalan dengan baik melalui pengawasan tersebut.

- 2) Sosialisasi pentingnya memperhatikan pencegahan pemilu
Fungsi pengawasan bukan hanya sekedar penindakan maupun pelaporan kecurangan yang terjadi di dalam rangkaian proses pemilu, namun fungsi pengawasan yang tidak kalah pentingnya yaitu pencegahan. Fungsi ini menjadi penting mengingat melalui forum warga yang terdapat elemen masyarakatnya, saat ini diharapkan mampu untuk melakukan pencegahan di ranah Masyarakat. Melalui forum warga inilah partisipasi Masyarakat untuk memiliki sikap waspada terhadap permasalahan yang ada di Tengah Masyarakat terkait pemilu. Misalnya dengan mengajak warga yang lain untuk menolah segala bentuk money politic, hal ini dapat dilakukan sebelum adanya pelanggaran bukan setelah terjadinya pelanggaran tersebut. Apresiasi tertinggi dari terbentuknya forum warga ini salah satunya adalah Masyarakat dapat melakukan fungsi pencegahan. Sehingga penting bagi Masyarakat untuk memahami bagaimana melakukan

pencegahan yang sesuai dengan peraturan yang ada.

- 3) Sosialisasi tata pelaporan dugaan pelanggaran pemilu
Tata laporan dugaan pelanggaran pemilu masih menjadi barang yang tabu untuk diketahui oleh warga, sehingga masih banyak warga yang ragu untuk melakukan pelaporan dugaan adanya pelanggaran karena ketidaktahuan tentang tata cara pelaporan dugaan pelanggaran pemilu yang sesuai dengan regulasi dalam kepemiluan. Karena itulah materi sosialisasi tata pelaporan dugaan pelanggaran pemilu perlu disampaikan dalam kegiatan forum warga agar warga dapat memahami tata cara pelaporan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga potensi seperti main hakim sendiri terhadap pelanggaran yang ada tidak akan muncul dalam ranah pemilu.
- 4) Pembagian materi sosialisasi pengawasan Pemilu.
Ketika forum warga dibentuk maka yang dibutuhkan adalah menambah pengetahuan dan wawasan Masyarakat terkait dengan pengawasan pemilu. Karena untuk menjadikan

pemilu yang terlegitimasi baik oleh Masyarakat maka diperlukan Masyarakat yang memahami secara baik mengenai pengawasan pemilu. Salah satu pengetahuan pengawasan pemilu tersebut dapat dibagikan ke dalam materi sosialisasi pengawasan pemilu dengan harapan materi ini dapat tersampaikan dengan baik kepada Masyarakat melalui kegiatan forum warga. Sehingga warga dapat berbagi informasi terkait pengawasan pemilu kepada warga yang lain secara baik dan sudah sesuai dengan materi sosialisasi pengawasan pemilu.

Sarana Forum Warga Pengawasan Pemilu

Pelaksanaan sosialisasi Pengawasan melalui Forum Warga dapat menggunakan sarana-sarana, komunitas adalah sebuah kelompok social dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, pada umumnya memiliki ketertarikan yang sama dalam suatu hal. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, kebutuhan, risiko, kegemaran yang serupa. Karena sudah memiliki banyak kesamaan itulah maka forum warga dapat masuk di dalamnya. Komunitas ini akan lebih efisien digunakan karena tidak perlu lagi untuk menyatukan para warga dan lebih efektif karena dapat secara langsung memberikan materi-materi terkait dengan pengawasan pemilu.

Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia. Perempuan masa kini tidak lagi dinomorduakan, adanya persamaan derajat antara laki-laki dan Perempuan membuat Perempuan dituntut mampu untuk tampil dalam berbagai sektor termasuk dalam kepemiluan agar tidak ada lagi ketimpangan antara Perempuan dan laki-laki. Kesempatan ini yang harus diambil oleh kegiatan forum warga, agar Perempuan dapat terlibat secara aktif dalam pengawasan pemilu sebagai bentuk keikutsertaan dalam menyukseskan pemilu yang berkualitas.

Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Pemilih pemula terdiri dari Masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Salah satu kategori pemilih yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi di masa yang akan datang adalah pemilih pemula. Selain jumlahnya yang akan terus bertambah, potensi daya kritis mereka dapat menentukan sebuah hasil pemilu. Pengenalan pengawasan pemilu kepada pemilih pemula sangat penting untuk dilakukan terlebih kepada mereka yang baru berusia 17 tahun. Pemahaman yang baik itu diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus menjadi pemilih yang cerdas dan dapat turut serta dalam melakukan pengawasan.

Agama sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Secara khusus, agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut oleh suatu kelompok atau Masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai sesuatu yang suci. Agama juga bisa berfungsi sebagai

legitimasi politik sejak zaman dahulu hingga sekarang. Di sejumlah negara, agama-politik banyak menjalin hubungan yang saling menguntungkan. Politik memberi jaminan proteksi keamanan masyarakat agama, sementara agama memberi “lehitimasi teologis” untuk melanggengkan kekuasaan politik. Pengawasan pemilu dapat hadir dalam kelompok agama untuk memastikan pengawasan pemilu yang dapat melanggengkan kekuasaan politik tanpa adanya stigma negative.

Pemilu merupakan ajang partisipasi bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali dengan para penyandang disabilitas. Disabilitas dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini memiliki peranannya dalam pemilu. Sehingga penting untuk ikut melibatkan kelompok disabilitas yang dapat mengakomodir suara dari pemilih disabilitas.

Aparat negara bertugas untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan Pembangunan. Aparat negara harus tetap dapat menjaga independensinya dan jangan sampai ikut kampanye mendukung salah satu pasangan calon atau menggunakan fasilitas negara untuk mendukung salah satu pasangan calon. Ikut serta dalam pengawasan pemilu menjadi modal dasar bagi aparat pemerintah yang bersih serta mengedepankan kepentingan negaranya.

Implementasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Berbasis Ramah Lingkungan

Kegiatan Forum Warga yang diselenggarakan oleh Bawaslu bersama dengan warganya dilaksanakan pada tanggal 9 November 2024 yang

bertempat di Saung Monteng Kamojang, Majalaya, Kabupaten Bandung. Rumah Konservasi saung Monteng ini adalah tempat warga biasa berkumpul dan berdiskusi bersama. Acara kegiatan forum warga ini merupakan inisiatif dari sesepuh setempat dan bekerja sama dengan Bawaslu untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat setempat mengenai pengawasan partisipatif yang berbasis ramah lingkungan. Kegiatan forum warga di Saung Monteng Kamojang ini dihadiri oleh warga setempat yang datang untuk diberikan pemahaman mengenai pengawasan partisipatif. Kegiatan forum warga ini menunjukkan sinergi yang terjalin antara Masyarakat dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Untuk menciptakan Pilkada yang adil, jujur, dan ramah terhadap lingkungan. Pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga menjadi hak dan kewajiban setiap individu dalam menjaga integritas Pilkada 2024. Poin poin utama yang menjadi hasil dari diskusi bersama di kegiatan Forum Warga ini yaitu;

- 1) Menghasilkan Pemilu yang Ramah Lingkungan
Forum ini berhasil menanamkan kesadaran bahwa keberlanjutan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, termasuk dalam konteks Pilkada 2024 di Jawa Barat. Kampanye yang ramah lingkungan, pengelolaan sampah yang baik, dan pelaporan alat peraga menjadi Langkah penting dalam mewujudkan Langkah penting untuk mewujudkan Green Elections.
- 2) Peran Pendidikan Politik
Masih diperlukan Upaya yang lebih intensif untuk

mendidik masyarakat, terutama pada Tingkat lokal seperti desa, dan RW, agar lebih memahami peran mereka dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan nilai keadilan dan keberlanjutan.

- 3) Pengawasan Partisipatif yang Kuat
Forum warga ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang aktif dari Masyarakat dalam Upaya mencegah pelanggaran, seperti politik uang dan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan.

- 4) Kritik dan Penguatan Demokrasi
Kesadaran akan memilih pemimpin yang mempunyai visi yang baik terhadap lingkungan menjadi pijakan awal dalam membangun Masyarakat yang lebih peduli terhadap masa depan bangsa.

Melalui kegiatan forum warga yang diadakan di Saung Monteng Kamojang ini, Bawaslu tidak hanya menjalankan tugasnya dalam pengawasan saja tetapi juga memberikan pemahaman kepada warga mengenai pentingnya pengawasan partisipatif dan keterlibatan mereka dalam memastikan Pilkada 2024 di Provinsi Jawa Barat secara khusus di Kabupaten Bandung dapat berjalan selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

KESIMPULAN

Dalam konteks Pilkada 2024 di Provinsi Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang merupakan

Lembaga independen di Tingkat daerah, memiliki peran yang sangat krusial dalam penyelenggaraan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024. Bawaslu memiliki tugas utama yakni dalam mengawasi seluruh proses tahapan Pilkada mulai dari tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi Pilkada hingga pada tahapan penetapan pasangan calon terpilih. Di samping tugas utama tersebut, terdapat juga tugas yang lain, yaitu memberikan pemahaman dan Pendidikan kepada Masyarakat sipil mengenai Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Masyarakat yang dahulu hanya dianggap sebagai objek dalam pemilihan umum kini dapat bertindak sebagai subjek yang memiliki tugas mengawasi seluruh proses tahapan Pilkada. Bawaslu dapat mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 secara khusus di Provinsi Jawa Barat dengan menjadi bagian di dalam pengawasan partisipatif. Salah satu bentuk dari pengawasan partisipatif ini adalah dengan mengadakan kegiatan forum warga. Kegiatan Forum Warga ini menjadi wadah bagi Bawaslu untuk melakukan sosialisasi mengenai pengawasan partisipatif dan juga menjadi wadah bagi Masyarakat dan Bawaslu untuk saling berkomunikasi sehubungan dengan Pilkada yang akan dilangsungkan secara serentak. Forum warga ini juga dapat memberikan Masyarakat pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai penyelenggaraan Pilkada yang adil, jujur, dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Suwari Akhmaddhian, Erga Yuhendra, Yani Andriyani. 2020. "Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan

Umum yang Berkualitas”.
Conference On Law And Social
Studies.

Gokma Toni Parlindungan S, Michael
Manarov Gultom. 2023.
“Pendidikan Pengawasan Pemilu
Bagi Masyarakat Untuk
Mewujudkan Pemilu
Berintegritas”. Ensiklopedia
Education Review 5(1):6-
12. <https://doi.org/10.33559/eer.v5i1.1727>

Putri Amelia Nugraha, Muhammad
Hendri Nuryadi, Erna Yuliandri.
2023. “Strategi Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) Dalam
Meningkatkan Pengawasan
Partisipatif Di Kabupaten
Boyolali. Jurnal Pemikiran dan
Penelitian Kewarganegaraan
18(1):38-
56. <https://doi.org/10.20961/pknp.v18i1.85568>

Hendra Surya, Irwandi Irwandi. 2023.
“Peran Masyarakat dalam
Meminimalisir Terjadinya
Pelanggaran Pemilu”. Al Ukhwah:
Jurnal Pengembangan Masyarakat
Islam 2(2):144-151

Isnanto Bidja. 2022. “Fungsi
Pengawasan Partisipatif Dalam
Mwujudkan Pemilu Demokratis”.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
6(1):2034-
2041. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2740>